

Peran PBB Dalam Menyikapi Pelanggaran HAM Pada Konflik Internal Di Suriah

Kasanusi ¹, Biruni Pasha ²

^{1,2} Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Darul Ulum

m_hasansanusi@yahoo.com

Abstrak

Suriah merupakan satu dari sekian banyak negara-negara Arab di Timur Tengah yang sedang mengalami revolusi dan perang saudara. Dilatar belakangi oleh sikap otoriter pemerintah dan kemunduran ekonomi yang terjadi hingga terjadi perlawanan rakyat terhadap rezim Bashar al-Assad. Konflik di Suriah ini menarik perhatian dunia, karena salah satu kasus di Suriah ini telah masuk ke dalam kasus yang paling mencolok saat ini yaitu mengenai pelanggaran HAM. Dimana seharusnya kasus Suriah ini telah memenuhi kriteria untuk diterapkannya intervensi kemanusiaan. Menanggapi hal ini, masyarakat internasional, khususnya PBB, tidak tinggal diam. Mereka memberikan respons tanggap terhadap konflik internal yang terjadi di Suriah. Tindakan Presiden Suriah Bashar al-Assad menyerang oposisinya dianggap sebagai kejahatan yang harus dihentikan. Dewan keamanan mengecam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau al-Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat yang pro-demokrasi. Selain itu, keikutsertaan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah juga menambah penjelasan bahwa HAM merupakan alat politik bagi Negara tertentu untuk mencapai tujuannya.

Kata kunci : Suriah; Bashar al-Assad; HAM; resolusi PBB.

Abstract

Syria is one of the many Arab countries in the Middle East that are undergoing revolution and civil war. This was motivated by the authoritarian attitude of the government and the economic decline that occurred until there was a people's resistance against the regime of Bashar al-Assad. The conflict in Syria has attracted the attention of the world, because one of the cases in Syria has entered the most striking case today, namely regarding human rights violations. Where the Syrian case should have met the criteria for implementing humanitarian intervention. In response to this, the international community, especially the United Nations, did not remain silent. They provide a responsive response to the internal conflict in Syria. Syrian President Bashar al-Assad's actions against his opposition are considered a crime that must be stopped. The security council condemned the move repeatedly and called on al-Assad to stop attacks on pro-democracy people. In addition, the participation of the United States in the conflict in Syria also adds to the explanation that human rights are a political tool for certain countries to achieve their goals.

Keywords: Syria; Bashar al-Assad; HAM; UN resolutions.

Pendahuluan

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam pelanggaran HAM pada konflik Suriah, konflik di Suriah pemerintah berkuasa yang menggunakan alat negara (militer) untuk menghadapi protes yang dilakukan oleh rakyatnya, sehingga, memicu terjadinya pertempuran dalam negeri antara pemerintah (rezim penguasa Bashar al-Assad) dengan rakyat sipil. Kesenjangan sosial tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang meluas, kurangnya kebebasan politik dan penekanan negara di bawah Presiden Bashar al-Assad dengan gaya kepemimpinan otoriter merupakan pemicu terjadinya konflik didalam negeri yang dimulai adanya protes di Pasar Hamidiyah di bulan maret tahun 2011, Damaskus hal ini mongobarkan perlawanan demonstrasi pro-demokrasi termasuk adanya protes dari siswa sekolah yang berujung dengan ditangkapnya 15 siswa sekolah (Kompas, 2013 : 13).

Penangkapan ini memicu gelombang protes yang menuntut anak-anak tersebut dibebaskan. Reaksi tentara dalam menghadapi para pendemo dinilai berlebihan, karena 4 orang dilaporkan tewas dalam aksi ini. Gelombang protes pun meluas dari Deraa menuju kota-kota pinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau Laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur. Di kota-kota itu perlawanan semakin bergejolak dan sampai memakan korban jiwa. Sementara itu, di Aleppo, kota terbesar di Suriah setelah Damaskus (ibu kota) berbeda lagi ceritanya. Kelompok perlawanan bersenjata memang pernah menyentuh Damaskus, tetapi tak lama kemudian mereka berpindah ke Aleppo. Di kota inilah perang saudara pecah dan korban jiwa pun berjatuhan hingga membuat seisi kota tersebut hancur.

Ketika kerusuhan menyebar, tindakan keras pun semakin meningkat. Para pendukung oposisi mengangkat senjata pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad berjanji untuk menghancurkan “terorisme yang didukung pihak asing” dan memulihkan kontrol atas negara. Namun kekerasan meningkat dengan cepat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara, sekaligus menjadi awal mula perang Suriah karena ratusan brigade pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah (www.bbc.com, Posted on March 2, 2018).

Setelah penangkapan 15 siswa tahun 2011, terjadi sebuah perlawanan rakyat di kota Damaskus yang mengantarkan kota ini menjadi kota cukup suram untuk ditinggali. Penduduk kota Damaskus yang sebelumnya tidak merasakan dampak tersebut kini mulai merasakannya waswas dan khawatir. Sampai akhirnya Damaskus pun menjadi kota yang tidak aman lagi. Pada Hari sabtu, 14 Juli 2012, korban tewas sudah mencapai 17.000 orang. Itulah awal mula Damaskus pun terseret dalam perlawanan rakyat yang membuat ibu kota di Negara tersebut menjadi banjir akan sebuah darah rakyatnya sendiri.

Dua tahun berikutnya terjadi sebuah bom bunuh diri meledak dekat markas Partai Baath, tak jauh dari gedung Kedutaan Besar Rusia. Ini bukan pertama kalinya, namun salah satu aksi pengeboman terbesar sejak awal konflik Suriah. Utusan PBB melaporkan minimalnya 100 orang tewas dalam kejadian ini, sebagiannya anak-anak. Peristiwa ini mendapat reaksi dari ketua luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton yang memberikan kecaman serta Utusan khusus PBB untuk Suriah, Lakhdar Brahimi.

Eskalasi semakin naik di tahun 2013 dengan banyaknya rakyat Suriah yang melakukan perpindahan dan mengungsi ke negara-negara lain utamanya negara tetangga guna memperoleh perlindungan. Berdasarkan laporan PBB pada 18 Februari 2013, agen-agen PBB memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 821.000 orang. Pada 3 Maret 2013, perkiraan meningkat menjadi 975.000 orang. 16% dari jumlah ini mengungsi dalam selang waktu 12 hari terakhir. Menurut data terbaru dari UNHCR, minimalnya 2,5 juta rakyat Suriah menjadi pengungsi internal (Dina Y. Sulaeman, 2013 : 5).

The Syrian Observatory for Human Rights, sebuah kelompok pemantau yang berbasis di Inggris yang memiliki jaringan sumber di lapangan, telah mendokumentasikan jumlah kematian 353.900 orang pada Maret 2018, termasuk 106.000 warga sipil (<https://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/03/15>). Angka tersebut tidak termasuk 56.900 orang yang hilang dan diduga tewas. Kelompok ini juga memperkirakan sekitar 100.000 kematian belum didokumentasikan. Pusat Dokumentasi Pelanggaran, yang bergantung pada para aktivis di Suriah, telah mencatat apa yang dianggapnya melanggar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil. Lembaga ini telah mendokumentasikan 185.980 kematian terkait pertempuran, termasuk 119.200 warga sipil, pada Februari 2018.

Bukan hanya persoalan pertentangan yang memakan banyak korban jiwa, namun ada hal lain yang membuat konflik ini menjadi besar, ialah keikutsertaan pihak asing dalam konflik internal tersebut dan semakin menambah penjelasan bahwa HAM merupakan salah satu alat politik bagi suatu negara tertentu untuk mencapai tujuannya. Keikutsertaan Amerika Serikat dan negara yang kontra atau oposisi dengan pemerintahan Suriah tentunya ingin menumbangkan rezim Bashar al-Assad. Pihak asing tersebut, khususnya Amerika Serikat memberikan hak pada dirinya sendiri untuk menyerang negara lain atau pihak yang dianggap sebagai ancaman demi kelancaran suatu tujuan untuk kesejahteraan negaranya sendiri.

Metode

Tulisan ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan analisis teori peran (*role theory*), dengan pendekatan *realis theory* yaitu dengan mendeskripsikan peran-peran organisasi internasional (United Nations/PBB) dimana melalui data-data sekunder, menghasilkan data deskriptif menurut analisa serta fakta yang ada dari subjek atau objek yang diamati. Sehingga peranan PBB yang secara keseluruhan

menggunakan resolusi-resolusi dalam melakukan peranannya menyikapi pelanggaran HAM yang terjadi.

Teori peran berdasarkan dari sisi hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan penting untuk meninjau aksi-aksi yang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membantu menyelesaikan kasus konflik internal di Suriah. Organisasi Internasional dibagi menjadi dua tipe yaitu *International Governmental Organization* (IGO) seperti United Nations, NATO, dan IMF serta *Non-Governmental Organizations* (NGO) seperti Amnesty International dan International Redcross (Encyclopedia of The American Nation, diakses pada 19 Oktober 2016). Organisasi internasional ini ialah organisasi yang berdiri untuk meningkatkan kerjasama dengan negara dan juga bekerja secara sukarela yang bergerak atas adanya kesadaran moral yang tinggi terhadap lingkungan sekitar beserta dengan isinya (Global Issues, diakses pada 18 Oktober 2016). Organisasi-organisasi internasional mulai memberikan peran yang signifikan pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat karena memiliki rasa tanggung jawab atas masyarakat. Menurut J. Samuel Barkin peran organisasi internasional dapat dilihat dari segi hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan.

Hasil Dan Pembahasan

Awal Mula Terjadinya Konflik

Demonstrasi yang terjadi di kota Deraa dianggap sebagai awal perjuangan melawan rezim Assad, karena demonstrasi pertama yang memakan empat korban jiwa, empat demonstrasi itu tewas ditembak oleh aparat keamanan saat mereka demo menuntut kebebasan 15 siswa yang ditangkap dan ditahan oleh pihak keamanan. Dan dari sinilah, bukan dari Damaskus ataupun dari Aleppo kota besar kedua setelah Damaskus, revolusi itu bermula

Kejadian penangkapan 15 siswa yang keseluruhan laki-laki tersebut terjadi di Minggu pertama bulan Maret, tanggal 6 di sebuah sekolah di Deraa. Mereka berusia antara 10-15 tahun, membuat coretan di dinding sekolah yang menuliskan slogan revolusi seperti teriakan rakyat di Tunisia, Mesir, dan juga Libya : "*As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam !*", artinya "Rakyat/ingin/menumbangkan Rezim!". Sebuah slogan revolusi yang pernah dilihat dan baca di televisi yang menyiarkan revolusi di Tunisia, Mesir, dan Libya pada dinding sekolah.¹⁵

Apa yang terjadi di Deraa sudah "diramalkan" oleh Joshua Landis. Dalam tulisannya berjudul "*Deraa: the government takes off its gloves: 15 killed*" (*Syria Comment*, 23 Maret 2011). Joshua Landis menulis : Deraa sangat miskin dan islamis. Deraa merupakan contoh atau melambangkan segala persoalan yang ada di Suriah. Perekonomian yang gagal, ledakan penduduk, gubernur yang buruk, terlalu banyaknya orang yang menganggur, begitu sedikit kebebasan ada pada mereka dan pasukan keamanan yang suka menguasai serta memaksa. Kondisi seperti itu sangat mudah meledak. Meskipun pemerintah untuk sementara dapat menahan kerusuhan di Deraa. Namun protes-protes, demonstrasi-demonstrasi akan meluas sehingga membuat

tembok ketakutan runtuh. Sikap kaum muda berubah menjadi kemarahan. YouTube, Al-Jazeera, dan telepon seluler telah mengubah permainan dan memberikan senjata yang sangat kuat kepada rakyat untuk melawan otoritas yang berkuasa. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi memicu protes nasional menuntut pengunduran diri Presiden Assad. Pendekatan kekerasan yang dilakukan Assad kepada para demonstran menambah massif gerak demonstran. Pada Juli 2011, ratusan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri. Pendukung oposisi akhirnya mulai mengangkat senjata, pertama untuk mempertahankan diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka.

Kekerasan meningkat menjadi perang saudara saat pasukan pemberontak dibentuk melawan pasukan pemerintah untuk menguasai kota-kota dan pedesaan. Pertempuran mencapai ibu kota Damaskus dan kota kedua Aleppo pada tahun 2012. Pada bulan Juni 2013, PBB mengatakan 90.000 orang telah tewas dalam konflik. Pada bulan Agustus 2014 angka itu berlipat dua kali menjadi 191.000. Dan pada bulan Agustus 2015, angka korban mencapai 250.000 menurut PBB (Sugiono, 2012).

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik. Faktor-faktor utama yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Suriah, antara lain :

1) Bencana Kekeringan Berkepanjangan (2006-2011)

Pada tahun 2006-2011 Suriah mengalami bencana kekeringan yang panjang. Semua hewan ternak mati dan semua hasil pertanian mengalami gagal panen dan hancur. Namun, presiden Al-Assad cuek saja dengan apa yang tengah di alami rakyatnya. Dampak kekeringan begitu terasa dirasakan baik oleh para petani ataupun peternak. Dan hampir 1 juta penduduk Suriah harus kehilangan lahan pertanian maupun peternakannya.

2) Penyiksaan Terhadap Para Anak Muda Di Kota Daraa Yang Melakukan Protes Terhadap Rezim Pemerintah Al-Asaad (2011)

Menanggapi dampak kekeringan 2006-2011, beberapa pemuda di kota Daraa memprotes pemerintah. Mereka mencoret-coret tembok untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak bertindak untuk mengatasi krisis pangan dan lahan pekerjaan. Coretan tersebut berisi tuntutan revolusi. Kemudian, para 15 pemuda yang melakukan protes tersebut ditangkap dan disiksa.

3) Konflik Yang Berkembang Menjadi Perang Sipil (2012)

Pemerintah ingin menghancurkan para pemberontak dengan kekuatan penuh, dan tidak mempedulikan warga sipilnya sendiri. Pemberontak yang merupakan kelompok oposisi pemerintah memiliki tujuan untuk meruntuhkan rezim Al-Assad.

Presiden Al-Assad sengaja menyerang kaum islam sunni tanpa memandang apakah itu warga sipil atau pemberontak. Presiden Al-Assad mencoba mengubah konflik yang awalnya pemerintah vs rakyat menjadi perang antar golongan agama. Al-Assad sengaja membuat kaum ekstrimis menyerang dirinya agar dikasihani oleh dunia. Perang saudara yang telah dibuatnya menewaskan 300.000 jiwa dan pada akhirnya 12 juta warga suriah harus mengungsi.

4) Berkembangnya Golongan Islam Sunni Garis Keras Menjadi Kelompok Anti-Assad (2013)

Strategi Al-Assad cukup berhasil. Golongan Islam Sunni garis keras menjadi kelompok anti-Assad terbesar. Mereka juga mendapat dukungan dari negara-negara Sunni seperti Arab Saudi dan Qatar. Sedangkan pemerintahan Al-Assad mendapat dukungan dari Iran sebagai negara pelindung kaum Syiah. Iran juga mendukung misi Hizbullah di Libanon yang bertempur mendukung rezim Al-Assad. Bahkan pemerintah Iran mengirim para penasihat militer ke Damaskus, selain itu mereka juga mendukung pemerintah Al-Assad dengan uang, senjata dan tentara.

5) Suriah Terbelah Menjadi 4 Pihak (2014)

Konflik terus berkembang, hal ini menyebabkan Suriah terbelah menjadi empat pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah pemerintah, pihak pemberontak, ISIS dan Kaum Kurdi.

Sebuah wawancara dengan jaringan *AS Fox News*, Rabu 18 September 2013, Bashar al-Assad menyebut bahwa konflik yang terjadi di Suriah bukan “perang saudara” melainkan telah diserang oleh puluhan ribu pejuang jihad asing yang bersekutu dengan al-Qaeda.

Dalam update *Institute for The Study of War* pada 6 Maret 2018, dikutip Al Jazeera pada Ahad (18/03/2018) memperlihatkan peta konflik Suriah yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Dan telah dikuasai oleh banyak kepentingan dari berbagai kelompok yang ada di Suriah.

a) Perkembangan Konflik

Krisis politik dalam negeri yang terjadi di Suriah saat ini nampaknya sudah mencapai klimaks, terutama dengan semakin meningkatnya kontak senjata antara pemerintah Bashar al-Assad dengan kubu pemberontak di beberapa kota. Sejak meletusnya perang sipil puluhan ribu orang tewas serta ribuan lainnya harus mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Turki, Yordania dan Lebanon.

Mulai tahun 2013, kaum jihad garis keras, termasuk sayap Al Qaeda di Suriah yakni Front Al-Nusra, memperluas area pengaruhnya di Suriah Utara dengan merekrut pemberontak atau oposisi moderat. ISIS memasuki konflik Suriah dengan membentuk kelompok milisi Jabal Nusra atau Front al-Nusra, sebelum mengumumkan penggabungan dengan ISIS pada tahun 2013 yang ditolak oleh al-Qaeda. Fokus pemerintah Suriah pada upaya militer untuk menggempur kelompok-kelompok oposisi moderat memberi kesempatan pada ISIS untuk melancarkan manuver-manuver mereka.

Di bulan Februari 2013, PBB mengatakan bahwa jumlah korban tewas selama dua tahun terakhir dalam konflik di Suriah mencapai lebih dari 70.000 jiwa. Berdasarkan laporan PBB tanggal 18 Februari, agen-agen PBB memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 821.000 orang yang membanjiri negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan. Dan selang 12 hari kemudian para pengungsi terus meningkat menjadi 975.000 orang. Di bulan yang sama tepatnya tanggal 21 hari Kamis, sebuah

bom bunuh diri meledak tak jauh dari Kedutaan Besar Rusia dekat markas Partai Baath di Distrik Mazraa, Damaskus, hingga memunculkan 70 korban jiwa.

Laporan PBB yang lebih rinci tentang aksi kekerasan di Suriah muncul pada 11 Maret 2013, disusun oleh *Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic* yang dibentuk oleh *Human Right Council*, sebuah agen di bawah PBB. Laporan itu, menyebutkan bahwa tentara pemerintah telah membombardir berbagai kawasan sehingga menjatuhkan korban jiwa dan berbagai laporan negatif tentang aksi tentara Suriah, namun juga secara terang-terangan menyebutkan jika kelompok bersenjata anti-pemerintah pun melakukan kekerasan kepada rakyat sipil. Berikut kutipan laporan tersebut:

“Sejak 15 Januari 2013, tercatat tiga peristiwa pengeboman di Suriah. Pada 21 Januari, sebuah bom mobil meledak di Al Salamiyeh, provinsi Hama. Front Al- Nusra menyatakan bertanggung jawab. Laporan awal di media mengklaim bahwa bom diledakkan di dekat markas milisi pro-pemerintah membunuh sekitar 40 orang. Laporan menjelaskan kelompok-kelompok bersenjata, dalam melakukan kekerasan di daerah padat penduduk sipil, sering melakukannya tanpa memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil. Bukti menunjukkan, kelompok anti-pemerintah telah memiliki akses yang lebih besar terhadap senjata, namun kurangnya keahlian dan pelatihan sering menyebabkan penggunaan senjata secara tidak profesional, tanpa pandang bulu dan kurang berupaya melindungi warga sipil selama serangan itu”.

(Diolah dari data sekunder)

Faktor utama yang menyebabkan konflik di Suriah ialah faktor mazhab. Alasannya karena konflik di Suriah melibatkan banyak aktor, bukan hanya oposisi penentang Assad yang bermazhab Sunni, tetapi juga melibatkan pemimpin-pemimpin negara seperti Amerika, Perancis, dan Inggris. Keterlibatan berbagai pihak itu dalam konflik di Suriah membuat konflik yang terjadi sejak 11 Maret 2011 itu tak kunjung terlihat mereda. Korban yang tercatat dari sejak konflik hingga April 2013 sudah mencapai 92.900-100.000 jiwa.

Tanggal 21 Agustus 2013. Washington, pendukung oposisi moderat, menuding rezim Assad telah membunuh lebih dari 1.400 orang dengan senjata kimia di distrik yang dikuasai oposisi di Damaskus. Sebulan kemudian, September, Amerika Serikat dan Rusia, sekutu Assad, setuju dengan rencana untuk menekan penggunaan senjata kimia. Presiden Barack Obama ketika itu bersumpah untuk bertindak jika Suriah menyeberangi "garis merah" dengan menggunakan senjata kimia. Sejak tahun 2014, Tim Pencari Fakta (FFM) OPCW di Suriah dan Mekanisme Penyelidikan Bersama PBB-OPCW yang sekarang sudah dibubarkan, telah menyelidiki dugaan penggunaan bahan kimia beracun untuk tujuan kebencian di Suriah. Mereka memutuskan terdapat

37 kejadian dimana bahan kimia digunakan atau kemungkinan digunakan dari bulan September 2013 sampai April 2018.

Serangan paling banyak dilaporkan terjadi di provinsi Idlib di barat laut. Juga terdapat banyak peristiwa di provinsi tetangga Hama dan Aleppo, serta di daerah Ghouta Timur di dekat Damaskus, menurut data BBC. Semua tempat ini adalah daerah kekuasaan oposisi selama perang. Lokasi dimana dilaporkan paling banyak jatuh korban diduga akibat serangan kimia adalah Kafr Zita, di provinsi Hama dan Douma di Ghouta bagian Timur. Kedua kota ini menjadi tempat perang antara pejuang oposisi dengan kekuatan pemerintah. Menurut sejumlah laporan, serangan yang paling mematikan terjadi di kota Khan Sheikhoun, provinsi Idlib pada tanggal 4 April 2017. Pejabat kesehatan pihak oposisi mengatakan lebih dari 80 orang tewas pada hari itu.

Meskipun senjata kimia mematikan, pengamat HAM PBB yang kemudian menegaskan pada sebagian besar kejadian dimana warga sipil terbunuh dan menjadi sasaran melibatkan penggunaan senjata konvensional, seperti bom curah dan bahan peledak di daerah yang sebagian penghuninya adalah warga sipil. Serangan udara pertama Barat yang dilancarkan pada bulan September 2014, menunjukkan bahwa secara langsung ikut campur untuk melawan kelompok jihad, tapi tidak untuk melindungi warga sipil di daerah oposisi yang dikuasai pemerintah. Hal ini membuat kalangan oposisi Suriah merasa dikhianati, dan mengesankan bahwa solusi militer merupakan prioritas dibanding pencarian untuk penyelesaian damai.

Di samping itu, kamp pengungsian warga Suriah di wilayah Yordania akan segera bertambah seiring dengan peningkatan laju pengungsi yang mencapai 600 jiwa setiap harinya. Sampai dengan bulan April 2014, dua kamp pengungsian yang berada di Yordania, Zaatari dan Azraq, masing-masing menampung 100.000 dan 130.000 jiwa. Yordania menampung tidak kurang dari 585.000 pengungsi Suriah. Selama tiga tahun terakhir dari mencuatnya konflik, instabilitas politik dan krisis Suriah telah memberikan dampak negatif pertumbuhan ekonomi Libanon yang sebelumnya relatif stabil. Walaupun tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Libanon telah menandatangani berbagai perjanjian HAM internasional yang krusial bagi upaya perlindungan pengungsi. Namun demikian, isu penegakan hukum dan praktek administrasi masih menjadi permasalahan dan menghambat proses pemenuhan kebutuhan para pengungsi.

Serangkaian kemenangan pemberontak pada awal tahun 2015 terutama di kota Idlib membuat Presiden Assad dipaksa mengakui bahwa kekurangan pasukan telah membuatnya menyerahkan wilayah-wilayah tersebut. Namun pada tanggal 30 September 2015, Rusia meluncurkan serangan udara untuk pertama kalinya demi mendukung Assad. Moskwa mengatakan, mereka menargetkan "kelompok-kelompok teroris". Hingga akhirnya Rezim Suriah, yang didukung Rusia, sejak Maret 2015 berangsur mulai merebut kembali wilayahnya dari ISIS.

Pada Selasa, 4 April 2017, terjadi serangan senjata kimia yang menewaskan sedikitnya 86 orang, merevisi angka kematian sebelumnya 72 orang di Idlib yang dikuasai oposisi.²⁹ Pemerintah Barat menuduh Assad menggunakan senjata yang

terlarang itu. Damaskus dan Moskwa menyangkal tudingan itu. Tiga hari kemudian, Jumat (7/4/2017) dini hari, kapal induk AS di Laut Mediterania menembakkan 60 rudal Tomahawk-nya ke pangkalan udara rezim Assad di dekat Homs, Suriah tengah.

Pada Januari 2018, Rusia mensponsori pembicaraan mengenai masa depan Suriah di kota Laut Hitam Sochi, tetapi blok oposisi memboikot konferensi, mengklaim itu adalah upaya untuk memotong upaya PBB untuk menengahi kesepakatan. Dan di pertengahan tahun tepatnya di bulan Agustus, pasukan pro-pemerintah dikerahkan untuk serangan besar terhadap idlib dan daerah sekitarnya. Terhitung hingga tahun 2018, konflik tersebut telah membunuh 110.687 warga sipil, termasuk lebih dari 20.000 anak dan hampir 13.000 wanita. Sementara dari pihak pro pemerintah, lebih dari 124.000 pejuang tewas, setengah dari mereka adalah pasukan rezim. Sisanya bermacam-macam milisi Suriah dan asing yang setia kepada Assad. Sebanyak 1.665 korban berasal dari gerakan Hezbollah Lebanon. Observatorium mencatat kematian 64.000 Islamis garis keras dan jihadis, termasuk dari kelompok Negara Islam dan mantan aliansi Al-Qaeda. Sementara 64.800 pejuang lain dari pasukan lain, termasuk pemberontak non-jihadis, tentara yang membelot dan faksi Kurdi, juga tewas sejak 2011.

Pelanggaran HAM Dalam Konflik Suriah

Di dalam bukunya Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 yang sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, menulis bahwa HAM berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Konsep tentang manusia, dalam Bahasa Inggris disebut *human being*. Pada umumnya ketika kita mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud konkret ini adalah orang.

HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang ada dan melekat pada diri manusia yang apabila hak tersebut tidak ada, maka mustahillah seseorang itu hidup sebagai manusia. Karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang ingin bebas. Satu-satunya hak ini dimiliki manusia semata-mata karena dia adalah manusia yang memiliki akal budi, bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Manusia yang boleh memiliki HAM adalah manusia yang hidup, apabila manusia itu mati maka tidak dapatlah dia menjalankan hak-haknya sebagai manusia.

Sejarah manusia mencatat bahwa peperangan (konflik bersenjata) antar negara dengan negara, negara dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat sering kali menimbulkan pelanggaran HAM. Konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM yang masih berlangsung sampai sekarang dan belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa konflik tersebut akan berhenti adalah konflik bersenjata di Suriah. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat. Negara yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Bashar al- Assad memerintahkan tentaranya untuk menghadapi para

demonstran dengan kekerasan dan senjata-senjata berat yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang dialami oleh warga sipil.

Laporan yang dilansir hari Rabu 13 November 2013 oleh Komisi Penyidikan Suriah PBB membeberkan pengepungan dan serangan senjata berat tanpa henti, penyiksaan, eksekusi, dan pemerkosaan meluas. Dikatakan, serangan senjata berat tanpa pandang bulu menimbulkan sebagian besar korban jiwa warga sipil, dan merupakan penyebab utama penduduk lari ke wilayah-wilayah lain di Suriah atau ke negara tetangga.

Badan PBB Urusan Pengungsi melaporkan pekan lalu bahwa lebih dari dua juta orang telah mengungsi dari Suriah sejak konflik berkobar tahun 2011, sementara 4,25 juta warga lari ke tempat-tempat lain di Suriah. Badan pengungsi PBB mengatakan, penyiksaan terus dilakukan kedua pihak. Gerakan perlawanan yang meletus di Suriah, sejak Maret 2011. Berikut adalah kronologi pelanggaran HAM mulai dari tingkat yang ringan sampai pada tingkat yang paling berat.

Dewan Kemanan PBB mengecam keras penggunaan senjata berat di Houla. Menurut Whitson, tidak cukup jika PBB mengecam tanpa aksi nyata. Menurutnya Dewan keamanan (DK) PBB harus mengusut kasus ini dan menindak tegas pelakunya. Insiden tersebut membuat dunia mengecam Suriah. Pembantaian lebih dari 90 warga sipil di kota Houla, Suriah memicu kecaman dari berbagai kalangan di dunia. Dua pandangan dalam konflik Suriah. Pertama, pelanggaran HAM terjadi karena al-Assad mempertahankan diri dan negaranya (*survive*) dan untuk menciptakan kembali perdamaian dan keamanan nasional. Untuk itu, dia harus siap siaga untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap siapapun yang hendak menggulingkan kekuasaannya (*egoisme*). Kedua, terlihat campur tangan Amerika Serikat dan Inggris dalam konflik ini dalam hal pembiayaan senjata dan sebagai inisiator dalam mobilisasi demonstran yang kontra terhadap pemerintahan Bashar al-Assad.

Selain itu, realisme memandang HAM atas konflik yang terjadi di Suriah dengan adanya intervensi pihak asing, salah satunya adalah Amerika Serikat. Hal itu membuat pemerintah Suriah melakukan cara apa pun untuk bertahan dari serangan yang akan dilancarkan oleh Amerika Serikat. Suriah sangat tidak setuju dengan campur tangan Amerika Serikat dan beberapa Negara barat lainnya dengan dasar moral dan menindak tegas pelanggaran HAM di Suriah. Sebagai Negara otoriter, Suriah merasa mampu untuk mempertahankan negaranya dari ancaman pihak asing.

Peran Pbb Dalam Konflik Suriah

Hal-Hal Yang Dilakukan PBB Melalui Resolusi PBB Oleh Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah merupakan salah satu organ utama dalam organisasi PBB yang bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan negara-negara anggota PBB maupun bukan negara anggota, selama mengancam perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama Dewan Keamanan PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, yang dilakukan dengan dua cara : yang pertama adalah penyelesaian secara damai sengketa-sengketa

internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua (yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai) adalah dengan tindakan pemaksaan.

Dewan Keamanan juga sudah seharusnya berperan pada konflik yang terjadi di Suriah yang sudah memasuki babak paling kritis, kerugian baik materiil dan moril terus menerjang rakyatnya. Dewan Keamanan mengecam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat pro-demokrasi. PBB atau Dewan Keamanan secara khusus bertindak dalam menangani konflik yang terjadi di Suriah. Sehingga muncul pertanyaan besar mengenai efektifitas Dewan Keamanan PBB yang dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya. Eskalasi konflik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta meluasnya wilayah pertempuran dan semakin banyaknya korban jiwa merupakan problematika kemanusiaan yang dianggap gagal dijawab oleh Dewan Keamanan PBB. Maka akan menjadi suatu analisis yang menarik untuk dikaji.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi menyangkut situasi konflik yang berkaitan dengan Suriah. Ada beberapa resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan melihat bagaimana efektifitasnya di lapangan terkait kondisi konflik yang terjadi di Suriah antara lain :

1) Resolusi 2042 (14 April 2012)

Resolusi ini mengaskan komitmen utama Dewan Keamanan PBB untuk mendukung resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum terkait persoalan kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Suriah dan untuk tujuan serta prinsip piagam mengutuk pelanggaran hak asasi manusia manusia yang terjadi di Suriah. Melalui resolusi ini pula Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Suriah untuk melaksanakan usulan tiga dari enam poin yang dicetuskan oleh utusan PBB dan Liga Arab, diantaranya :

- a. Menghentikan gerakan pasukan menuju pusat-pusat penduduk
- b. Menghentikan penggunaan semua senjata berat
- c. Mengendurkan kamp-kamp konsentrasi militer dari daerah populasi pusat

Sebagai muatan pokok dalam resolusi ini, Dewan Keamanan mempertegas posisinya untuk mendesak seluruh pihak-pihak bersenjata yang tengah terlibat dalam sengketa untuk bisa mematuhi tiga dari enam poin yang diusulkan oleh utusan perdamaian gabungan dari PBB dan juga Liga Arab, yakni Kofi Annan. Kondisi yang melatarbelakangi terbitnya resolusi ini adalah meningkatnya eskalasi penggunaan senjata berat yang dilakukan oleh para angkatan bersenjata dari pihak rezim Bashar Al-Assad dan juga intensitas penggunaan kekerasan serta pendirian kamp-kamp konsentrasi militer di tengah kawasan padat penduduk.

2) Resolusi 2043 (21 April 2012)

Setelah seruan Dewan Keamanan PBB untuk penghentian kekerasan melalui resolusi sebelumnya, Dewan Keamanan PBB kemudian menerbitkan salah satu resolusi dan memutuskan untuk mendirikan satu tim pemantau khusus yakni *United Nations Supervision Mission In Syria* (UNSMIS) yang berada di bawah

komando seorang Kepala Militer Observer, dan terdiri dari penyebaran awal sebanyak 300 pengamat militer tak bersenjata untuk melakukan monitoring atas kesepakatan perdamaian yang telah dicetuskan antara pihak-pihak yang bersengketa. Tim ini bertindak dalam rangka untuk melaksanakan mandat dari implementasi enam poin pokok perdamaian yang telah dicetuskan oleh Kofi Annan sebagai utusan gabungan antara PBB dan Liga Arab. Selain itu, resolusi ini juga menyerukan bagi seluruh pihak untuk bisa bekerja secara kooperatif dalam rangka untuk membantu pelaksanaan misi dari UNSMIS sebagai bagian dari upaya penyelesaian damai yang dilaksanakan oleh Dewan Keamanan PBB.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Keamanan PBB memperbarui kembali mandat yang diberikan terhadap UNSMIS dengan memperpanjang jangka waktu tugas UNSMIS dan mengkonfigurasi ulang misi perdamaian terhadap konflik Suriah. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi No. 2059 yang memuat keputusan terkait pemberian pujian terhadap kinerja UNSMIS sekaligus memperbarui 84 mandat kerja dari tim supervisi tersebut. Resolusi ini sendiri diterbitkan 20 Juli 2012 atau bertepatan dengan batas akhir tim pemantau sesuai yang dicantumkan dalam resolusi sebelumnya yakni 90 hari.

3) Resolusi 2139 (22 Februari 2014)

Sebagai bagian dari upaya terus-menerus dan telah dikeluarkannya beberapa resolusi yang tercatat yakni, resolusi bernomor 2042, 2043, dan 2118 telah terjadi suatu perkembangan yang cukup mengejutkan, dimana kekerasan yang terjadi semakin meningkat dalam intensitas yang sangat mengerikan. Laporan dari Sekretaris Jenderal PBB adalah lebih dari 100.000 orang termasuk di antaranya 10.000 anak-anak telah menjadi korban dari konflik bersenjata yang terjadi di Suriah. Dalam resolusi ini pula, Dewan Keamanan mengabarkan kondisi yang sangat memprihatinkan dimana sebanyak 2,4 juta jiwa telah menjadi pengungsi yang melarikan diri ke berbagai wilayah di sekitar Suriah, yakni Lebanon, Yordania, Turki, Irak dan Mesir. Salah satu poin yang patut dicermati dalam resolusi ini ialah kesadaran PBB terkait adanya manuver dari organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda (sebagai organisasi terorisme). Mengutuk dengan keras bahwa terorisme dalam segala hal adalah ancaman paling buruk bagi perdamaian internasional. Sementara itu, dalam resolusinya ini Dewan Keamanan PBB kembali mendesak bagi seluruh pihak untuk segera mengakhiri kekerasan dan merujuk kembali kepada Konferensi Jenewa tanggal 30 Juni 2012 untuk segera membentuk pemerintahan transisi yang dapat menghadirkan pemerintahan yang aspiratif. Dalam resolusi ini Dewan Keamanan PBB juga menyatakan kembali sikapnya terkait situasi kontemporer yang terjadi di Suriah, yakni :

- a. Mengutuk seluruh pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh pihak otoritas Suriah serta kaum oposisi. Hal ini berhubungan dengan terjadinya kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, serta terjadinya kejahatan yang menimpa anak-anak.

- b. Menuntut agar semua pihak segera mengakhiri segala bentuk kekerasan. Sebab kondisi yang terjadi telah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum perang.
 - c. Menuntut agar semua pihak segera menghentikan semua serangan yang mengarah terhadap warga sipil termasuk pengeboman udara, penggunaan bom barel dan penggunaan senjata berat lainnya.
 - d. Menuntut kepada semua pihak utamanya bagi pemerintah Suriah untuk menerapkan ketentuan 2 Oktober 2013 Pernyataan Presiden Dewan Keamanan (S/PRST/2013/15) dalam memfasilitasi perluasan bantuan operasi kemanusiaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari hukum humaniter internasional.
 - e. Mengajak semua pihak untuk segera mengangkat pengepungan daerah penduduk, termasuk di Kota Tua Homs (Homs), Nubl dan Zahra (Aleppo), Madamiyet Elsham (Pedesaan Damaskus), Yarmouk (Damaskus), Timur Ghouta (Pedesaan Damaskus), Darayya (Pedesaan Damaskus) dan lokasi lainnya. Serta menyerukan bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan jeda kemanusiaan atau gencatan senjata sehingga memungkinkan lembaga kemanusiaan dapat mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan medis.
1. Resolusi 2254 (18 Desember 2015)
- Dalam resolusi ini Dewan Keamanan PBB memberikan kebijakan terkhusus berkaitan dengan kondisi politik Suriah. Terbentuknya komunitas internasional baru dalam hal ini *International Syria Support Group* (ISSG) menjadi dinamika baru bagi kelanjutan konflik yang terjadi di Syria. ISSG dalam pernyataannya mendesak agar segera dilaksanakan transisi politik yang konsisten sebagaimana telah dibicarakan dalam Konferensi Jenewa 30 Juni 2012. Beberapa ayat dari resolusi ini ialah :
- a. Mengkonfirmasi ulang dukungan terhadap kesepakatan Konferensi Jenewa sebagai dasar dari transisi politik di Suriah dan mengakhiri konflik yang terjadi di Suriah.
 - b. Meminta kepada Sekretaris Jenderal melalui utusan khususnya di Suriah, untuk menghadirkan perwakilan dari pemerintah Suriah dan oposisi untuk terlibat dalam negosiasi formal pada proses transisi politik secara mendesak.
 - c. Mengakui peran dari *International Syria Support Group* (ISSG) sebagai platform pusat untuk memfasilitasi upaya PBB dalam mencapai kesepakatan politik di Suriah.
 - d. Mengungkapkan dukungannya dalam hal ini, demi proses politik yang terjadi di Suriah. Untuk menetapkan dalam enam bulan, proses transisi yang kredibel, inklusif dan pembentukan pemerintahan non-sektarian serta mendukung adanya proses penyusunan konstitusi baru. Dan lebih lanjut, menyatakan dukungannya untuk mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil, sesuai dengan konstitusi baru.

- e. Mengakui keterkaitan erat antara gencatan senjata dan proses politik parallel, dan dalam hal ini akan didukung oleh ISSG segera setelah perwakilan dari pemerintah Suriah dan oposisi telah memulai langkah awal menuju transisi politik di bawah naungan PBB.
 - f. Meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk memimpin upaya, melalui Kantor Utusan Khusus dan Konsultasi terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan persyaratan terkait proses gencatan senjata.
 - g. Menekankan terhadap perlunya mekanisme pemantauan gencatan senjata, verifikasi dan pelaporan. Meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan pada pilihan terkait mekanisme yang ditempuh.
2. Resolusi 2235 (7 Agustus 2015)
- Dalam resolusi ini, PBB menemukan indikasi terkait adanya penggunaan senjata kimia yang digunakan dalam konflik bersenjata. Penggunaan senjata kimia yang terjadi secara terang-terangan sesuai dengan temuan tim pencari fakta (*fact finding mission*) telah melanggar Konvensi mengenai Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia dan Pemusnahannya. Mengingat bahwa Suriah juga termasuk sebagai salah satu pihak yang telah menyetujui konvensi tersebut, penggunaan senjata kimia seperti zat klorin merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati dalam konvensi dan penggunaan senjata kimia merupakan pelanggaran serius dalam hukum internasional.
- Dalam resolusinya ini Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan yakni, mengingat dalam resolusi 2118, memutuskan bahwa Suriah akan bekerja sama sepenuhnya dengan *Organization For Prohibited Of Chemical Weapon* (OPCW) dan PBB :
- a. Mengulangi kecaman dengan keras terkait setiap penggunaan bahan kimia beracun seperti klorin, sebagai senjata dalam konflik Suriah.
 - b. Mengingat keputusan bahwa Suriah tidak akan menggunakan, mengembangkan, memproduksi, memperoleh, *stockpile*, mempertahankan senjata kimia.
 - c. Menyatakan tekad untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas tindakan ini dan menegaskan kembali bahwa orang-orang, badan, kelompok atau pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan-penggunaan bahan kimia sebagai senjata, termasuk klorin atau bahan kimia beracun.
 - d. Meminta kepada Sekretaris Jenderal, dalam koordinasi dengan Direktur Jenderal OPCW untuk mengoperasikan mekanisme investigasi dalam mengidentifikasi secara lebih luas individu, badan, kelompok atau pemerintah yang terlibat dalam penggunaan bahan kimia sebagai senjata.
- Selain kelima resolusi tersebut, sepanjang tahun 2012 hingga 2017 Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan

upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah, seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

	Tanggal	Pengambilan	Objek Resolusi
S/RES/2042	14 April 2012	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Situasi Perang Saudara Suriah
S/RES/2043	21 April 2012	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Penetapan Tim Pemantau PBB (UNSMIS) di Suriah
S/RES/2059	20 Juli 2012	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Pembaruan Mandat terhadap Misi Pengawasan di Suriah
S/RES/2118	27 September 2013	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Penghapusan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah
S/RES/2139	22 Februari 2014	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Pemberian Akses Bantuan Kemanusiaan di Suriah
S/RES/2165	14 Juli 2014	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Pengawasan Situasi Kemanusiaan di Suriah
S/RES/2209	6 Maret 2015	14-0-1 (Abstain : Venezuela)	Resolusi Mengenai Penggunaan Senjata Kimia di Suriah
S/RES/2254	18 Desember 2015	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Gencatan Senjata
S/RES/2268	26 Februari 2016	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Negosiasi Politik Antara Pihak yang Bersengketa
S/RES/2314	31 Oktober 2016	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Mandat OPCW dalam Mengidentifikasi Penggunaan Senjata Kimia di Suriah
S/RES/2319	31 Oktober 2016	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Pembaharuan Mandat OPCW di Suriah untuk Setahun
S/RES/2328	19 Desember 2016	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Pemberian Akses bagi Tim Pemantau Evakuasi Sipil dari Aleppo
S/RES/2332	21 Desember 2016	Suara Bulat	Resolusi Mengenai Otorisasi Pengiriman Bantuan Lintas Batas di Suriah

Tanggal 19 Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi terkait konflik di Suriah yaitu resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2328 dengan judul *"The Situation in the Middle East (Syria)"*. Resolusi tersebut dikeluarkan dengan suara bulat dari para anggota Dewan Keamanan PBB. Inti dari resolusi tersebut

memberikan mandat bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat sipil.

Bantuan yang dimaksudkan dalam resolusi di atas adalah berupa bantuan untuk mengevakuasi masyarakat sipil di Suriah yang menjadi korban pada konflik bersenjata di Suriah dan memberikan bantuan medis dengan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pertolongan medis tersebut seperti rumah sakit, transportasi, dan sebagainya. Berikut adalah efektivitas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2328 tahun 2016 :

Poin Resolusi	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
1. Meminta pihak- pihak terkait untuk mengevakuasi korban.	√	-
2. Melakukan evakuasi secara sukarela dan sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional.	√	-
3. Meminta PBB dan pihak terkait untuk mengawasi distrik timur Aleppo secara tanggap.	√	-
4. Memastikan kesukarelaan, keamanan dan martabat penduduk sipil di distrik timur Aleppo dan wilayah lainnya.	√	-
5. Meminta semua pihak untuk memberi izin penuh dan akses tanpa hambatan pada PBB dan sekutu pelaksana untuk memberikan bantuan.	√	-
6. Memanggil semua pihak untuk menghormati dan melindungi seluruh petugas medis dan fasilitas2 medis	√	-
7. Meminta Sekjen untuk mengambil langkah penting untuk membuat pengaturan, termasuk untuk pengaturan keamanan dan berkonsultasi dengan pihak yang berkepentingan, untuk mengizinkan PBB untuk mengobservasi dan institusi lainnya untuk kesejahteraan penduduk sipil di distrik timur kota Aleppo.	√	-
8. Meminta Sekjen melapor pada DK untuk melapor pada DK terkait pengimplementasian Resolusi ini.	-	√
9. Meminta para pihak untuk berperan aktif dalam menangkap masalah terkait konflik bersenjata di Suriah.	√	-

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah selama konflik berlangsung membuat Dewan Keamanan PBB mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk memberikan akses yang cepat, aman dan tanpa hambatan dalam pengiriman bantuan tersebut. Bantuan kemanusiaan itu, di dalamnya juga termasuk mengenai evakuasi warga sipil yang terdampak konflik serta bantuan medis, perlindungan petugas medis maupun fasilitas medis pada dasarnya sudah relevan dengan Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 23 Bab II Konvensi Jenewa 1949. Kemudian mengenai perlindungan petugas medis dan fasilitas medis diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Protokol Tambahan I

Mengenai Perlindungan Satuan-satuan Kesehatan dan Pasal 21 Bagian II Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Mengenai Kendaraan-Kendaraan Kesehatan.⁴³

Bantuan kemanusiaan yang berbentuk evakuasi masyarakat Suriah yang menjadi korban pada konflik Suriah dan memberikan bantuan medis dengan fasilitas medis untuk mendukung pertolongan medis itu seperti rumah sakit, transportasi, ditegaskan kembali selanjutnya bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa harus diterapkan sepenuhnya di dalam segala keadaan bagi semua orang yang dilindungi oleh persetujuan-persetujuan tersebut tanpa suatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas sifat atau asal mula sengketa bersenjata itu atau asas sebab-sebab yang ditimbulkan oleh atau yang dianggap berasal dari Pihak-pihak dalam sengketa (Yunus, 2003: 2).

Ketua Komisi Tinggi PBB untuk Kemanusiaan, Pangeran Zeid bin Raad Al-Husseini, Senin (19/03/2018), mengkritik keras Dewan Keamanan (DK) PBB yang gagal membela Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencegah lebih banyak kerugian nyawa di Suriah. Saat ini, sudah setengah juta lebih orang tewas akibat konflik di Suriah. Dia menambahkan bahwa banyak yang berusaha mendokumentasikan pelanggaran HAM ditangkap, disiksa atau dibunuh. DK PBB tak mungkin bisa berkorban seperti para pejuang HAM yang berada di seluruh penjuru Suriah.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik yang sangat kompleks, dikatakan bahwa konflik politik sebab konflik yang meletus terjadi diakibatkan kekecewaan atas rezim yang tidak mampu menghadirkan kesejahteraan atas rakyat Suriah. Di sisi lain konflik ini juga memiliki dimensi hukum yakni terkait dengan perebutan identitas pemilik kedaulatan serta pemerintahan yang sah, sehingga identifikasi yang tepat bahwa konflik ini memiliki muatan politis dan hukum yang mengakar menjadi satu kesatuan masalah. Keterlibatan atau campur tangan negara lain juga memberikan argument tambahan untuk menyatakan bahwa konflik ini berkembang dari sekedar perang sipil internal menjadi sebuah konflik internasional yang harus segera diselesaikan karena memberikan potensi ancaman terhadap perdamaian dunia.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dan dunia internasional untuk menegakkan HAM di Suriah adalah dengan mengutus mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk perdamaian di Suriah, begitu pula dengan Liga Arab yang menyerukan agar kelompok oposisi bersatu dan mengusulkan untuk dibentuknya pemerintahan transisi atas usulan PBB. Dan juga negara-negara Barat yang menarik duta besarnya dari Suriah, serta mengusir para diplomat Suriah ke negara asalnya. Meskipun begitu perdamaian masih saja belum tercapai karena adanya karena lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali berbeda pendapat dalam mencari solusi perdamaian

di Suriah. Hal ini terbukti di mana Rusia dan China sudah tiga kali memveto resolusi DK PBB untuk Suriah.

Daftar Referensi

- Andhika Bayu Trimulya, 2019, "Intervensi Amerika Serikat Di Suriah", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember
- A. Muh. Agil Mahasin, 2017, "Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Syria)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Internasional, Universitas Hasanuddin, Makasar
- Adriani Dyah Arum, "Implikasi Perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia terhadap Konflik Suriah", *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018
- A.Muchaddam Fahham, A.M. Kartaatmaja, "Konflik Suriah : Akar Masalah Dan Dampaknya", *Jurnal Politika*, Vol. 5, No. 1, 2014
- Achmad Satriya Widodo, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Suriah Melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa", *Naskah Publikasi*, 2019
- Budi Wirasatya A, 2018, "Peningkatan Keterlibatan Amerika Serikat Di Era Kepemimpinan Obama Dalam Konflik Suriah (2011-2016)", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Devianti Sekar Ayu, Rahayu, Soekotjo Hardiwinoto, "Penyelesaian Sengketa Di Suriah Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
- Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah*, Pustaka IIMaN, Depok 2013
- Hamid Awaludin, *HAM , Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendyat Sotopo, *Perilaku Organisasi : Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan* (Bandung : Rosda dan UNM, 2012)
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988
- Jesaya Brahmana dkk, "Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Sumatra Journal of Internasional Law*, 2013
- Nurchayawan Teddy & Lauw Wisnu, "Efektivitas Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Konflik Bersenjata Di Suriah", *Era Hukum; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16 No.1, Juni 2018

- Novianti, "Pengaruh Budaya Strategis Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Luar Negeri Barack Obama dan Donald Trump dalam Penyelesaian Konflik Suriah", *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 1, 2020
- Pupus Sofiyati, et.al., *Konflik Dan Stress : Makalah Pengembangan Dan Perilaku Organisasi* (Malang : Universitas Brawijaya, 2011)
- Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jurnal. (<https://online-journal.unja.ac.id>)
- Trias Kuncayono, *Musim Semi di Suriah*, Buku Kompas, Jakarta 2013
- Sulistio Hermawan "Konflik Di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015", Yogyakarta 2013 <https://jurnal.dpr.go.id>, "Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya"
- Vicky Fabiansyah, 2015, "Dukungan Amerika Kepada Oposisi Dalam Konflik Melawan Bashar Al-Assad Di Suriah (2011)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Mata Mata. Com, Awal Mula Perang Suriah : Bagaimana Konflik Panjang dan Berdarah Bisa Terjadi ? (<https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-konflik-suriah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/>), Sumber : www.bbc.com, Posted on March 2, 2018
- Alif.id, "Sejarah peperangan dan pergantian penguasa Suriah" (<https://alif.id/read/fadh-ahmad-arifan-m-ag/sejarah-peperangan-dan-pergantian-penguasa-suriah-b207703p/>)
- Muhammad Zulifan, "Mencari Ujung Batas Konflik Suriah" (<https://duniatimteng.id/mencari-ujung-batas-konflik-suriah/>), diakses : 16 Oktober 2015
- Kiblat "Ini Peta Konflik Suriah Terkini" (<https://www.kiblat.net/2018/03/19/ini-peta-konflik-suriah-terkini/>). Diakses pada Senin, 19 Maret 2018 17:38
Sumber : https://statik.tempo.co/data/2013/02/21/id_168724/168724_620.jpg